

PANDANGAN TIONGKOK ATAS KETERLIBATAN AMERIKA SERIKAT DALAM PROSES PENYATUAN TIONGKOK DAN TAIWAN

Ariestyo Ardyanto¹

1. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

ABSTRACT

Taiwan's state status is still questionable because many countries have not recognized Taiwan as a country, because China has always used the 'One China Policy' principle so that many Chinese people still think that Taiwan is a province of Fujian which is still in rebellion, while Taiwan calls itself a country. which already stands alone that China does not want to be compared to. Responding to the problem of relations between the United States and Taiwan, Xi Jinping, who is the president of China, issued tough sanctions against the United States, especially when there was a plan by the United States to sell military equipment to the Taiwanese government, the sale was a form of United States support for Taiwan's defense capabilities. to strengthen air and sea security. The existence of various interventions carried out by the US in the China-Taiwan reunification process made China furious, this gave rise to various foreign policies that were very vocal for both Taiwan and the US.

The researcher uses the Neo-Realism approach because in it there is an assumption that the international system is an anarchic system, there is no entity above the state that can govern the state. The neo-realism view also explains the existence of a balance of power in which there are various concepts of power that can balance world power. In addition, researchers also use the concept of foreign policy, the concept of the concept of national interest, and the concept of intervention. Researchers will use descriptive qualitative research methods.

Keywords: Intervention, Reunification, Response, Foreign Policy, Military, One China Policy

ABSTRAK

Status kenegaraan Taiwan masih dipertanyakan karena banyak negara yang belum mengakui Taiwan menjadi sebuah negara, karena Tiongkok selalu menggunakan prinsip 'One China Policy' sehingga masyarakat Tiongkok masih banyak menganggap bahwa Taiwan merupakan sebuah provinsi bagian Fujian yang masih memberontak, sedangkan Taiwan menyebut dirinya sebagai sebuah negara yang sudah berdiri sendiri yang tidak ingin disamakan oleh Tiongkok. Menanggapi persoalan hubungan antara Amerika Serikat dan Taiwan, Xi Jinping yang merupakan presiden Tiongkok mengeluarkan sanksi keras terhadap Amerika Serikat, terutama pada saat adanya rencana Amerika Serikat untuk menjual peralatan militer kepada pemerintah Taiwan, penjualan tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap kapabilitas pertahanan Taiwan untuk memperkuat keamanan udara dan laut. Dengan adanya berbagai intervensi yang dilakukan oleh AS terhadap proses reunifikasi Tiongkok-Taiwan membuat Tiongkok geram, hal ini menimbulkan berbagai kebijakan luar negeri yang sangat vokal bagi Taiwan maupun AS.

Peneliti menggunakan pendekatan Neo-Realisme karena di dalamnya terdapat asumsi yang mengatakan bahwa system internasional merupakan sistem yang anarkis, tidak ada entitas di atas negara yang dapat memerintah negara. Pandangan neo-realisme juga menjelaskan tentang adanya balance of power yang terdapat berbagai konsep kekuatan yang dapat menyeimbangkan kekuatan dunia. Selain itu, peneliti juga menggunakan konsep kebijakan luar negeri, konsep kepentingan nasional, dan konsep intervensi. Peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

Kata Kunci: Intervensi, Reunifikasi, Respons, Kebijakan Luar Negeri, Militer, One China Policy

PENDAHULUAN

Tiongkok adalah negara yang akhir-akhir ini menjadi pusat perhatian dunia. Diawali dengan kenaikan yang signifikan di berbagai aspek membawa Tiongkok sebagai negara yang diprediksi akan menjadi negara super power yang baru menggeser kedudukan Amerika Serikat. Salah satu aspek yang menarik adalah militer Tiongkok dengan karakternya yang defensif merupakan upaya pemerintah dalam menciptakan pertahanan yang kuat bagi negaranya, tidak hanya itu karakter defensif ini juga merupakan bukti nyata bahwa Tiongkok berperan besar dalam sistem perdamaian di kawasan Asia Timur (Dwi, 2015).

Kekuatan militer Tiongkok yang semakin meningkat merupakan bentuk tindakan Tiongkok dalam merespon ancaman negara lain yang berusaha mengganggu wilayah teritorialnya, namun peningkatan kekuatan militer tersebut dianggap Amerika Serikat sebagai ancaman yang dapat menjatuhkan kredibilitas Amerika Serikat di mata dunia. Untuk mempertahankan kedudukannya sebagai negara super power Amerika Serikat mulai merambah wilayah Asia Timur dan secara langsung turun tangan dalam berbagai kasus yang melibatkan Tiongkok (Dwi, 2015).

Dinamika hubungan antara Tiongkok dan Taiwan dapat dikatakan sebagai pola hubungan 'subordinasi'. Hal tersebut dikarenakan konflik yang terjadi antara Tiongkok dengan Taiwan telah berlangsung lama sejak tahun 1945. Setelah Partai Komunis China mengubah sistem monarki menjadi republik dan mengambil alih negara Tiongkok, serta kemenangan kaum komunis ini dengan mendeklarasikan Republik Rakyat Tiongkok pada tanggal 1 Oktober 1949. Partai Kuomintang yang dipimpin Chiang Kai-shek yang beraliran nasionalis membentuk dan membuat negara sendiri dan ingin lepas dari bagian negara Tiongkok setelah kalah perang sipil menghadapi Partai Komunis yang dipimpin oleh Mao Zedong (Sudjatmiko, 2010). Kekalahan tersebut membuat Partai yang beraliran Nasionalis ini melarikan diri menuju Pulau Formosa dan mendirikan negara bernama Republic of China. Dampak yang ditimbulkan pasca kemenangan Partai Komunis di Tiongkok adalah perkembangan komunisme di Asia menyebar luas di negara-negara Asia timur dan Asia Tenggara (Wijaya, 2020).

Dalam kontestasi geopolitik di Asia Timur, dinamika hubungan Tiongkok dan Amerika Serikat seringkali ditentukan oleh perkembangan isu Taiwan dan penyikapan kedua negara besar ini terhadap isu itu. Berbeda dengan negara-negara lain di panggung internasional, Taiwan bukanlah entitas politik yang berdaulat. Dalam forum-forum global, Taiwan diposisikan sebagai entitas ekonomi nonnegara. Karena itu, meskipun perkembangan ekonominya maju, Taiwan tidak memiliki kekuatan politik setara dengan negara-negara lain. Tidak mengherankan jika gerak Taiwan di lingkungan global sangat ditentukan oleh relasinya dengan kekuatan-kekuatan besar dunia seperti Tiongkok dan Amerika Serikat, dua negara yang paling berkepentingan di Selat Taiwan (Mubah, 2014).

Amerika Serikat juga melakukan pembicaraan langsung dengan Tsai Ing-wen yang merupakan Presiden Taiwan. Hal tersebut membuat Xi kerap melontarkan kritik yang keras terhadap Amerika. Xi mempertegas adanya One China Policy yang harus dihargai dan dihormati. Sanksi keras yang diberikan oleh Xi Jinping tersebut merupakan salah satu cara upaya Xi Jinping untuk menggagalkan Taiwan untuk dapat memerdekakan diri dari Tiongkok. Xi Jinping tidak menutup kemungkinan akan menggunakan kekuatan militer untuk meredam keinginan Taiwan. Militer di Tiongkok merupakan salah satu bagian yang penting dalam

strategi nasional, karena dapat menjaga kedaulatan nasional, integrasi teritorial, dan mencegah adanya perlawanan dari musuh yang mengganggu kepentingan nasional (Yuliantoro, 2009). Militer termasuk dalam Strategi Keamanan Tiongkok, yang di mana pada tahun 2015 Tiongkok mengeluarkan Buku Putih yang berisikan tentang strategi militer Tiongkok (Heath, 2016).

Selain militer, Tiongkok juga menekankan dalam bidang ekonomi dan politik untuk tetap menjadikan Taiwan bagian dari Tiongkok. Walaupun pada hubungan ekonomi Tiongkok dan Taiwan menjadi mitra yang baik. Namun hubungan ekonomi tersebut memicu adanya konflik politik di antara Tiongkok dan Taiwan. Karena, adanya hubungan ekonomi tersebut tidak mengurangi ketegangan dalam konflik Tiongkok dengan Taiwan. Permasalahan utama dalam memicu konflik Tiongkok dan Taiwan yaitu adanya masalah politik, yang menyangkut dalam permasalahan identitas dan kedaulatan. Kebangkitan Tiongkok tidak hanya mencakup kemampuan militernya tetapi juga pada kekuatan ekonomi dan politik. Sehingga, tidak hanya militer yang menjadi fokus Xi Jinping dalam bidang keamanan namun juga pada ekonomi dan politik (Kuntic, 2008).

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik suatu rumusan masalah, diantaranya: Adanya hubungan antara Tiongkok dan Taiwan yang selalu berdinamika serta keinginan Tiongkok dalam mewujudkan One China Policy; dan Adanya intervensi dari Amerika Serikat yang merupakan sebuah hambatan bagi Cina dalam melaksanakan kebijakan One China Policy. Merujuk pada rumusan permasalahan tersebut maka perlu adanya pemikiran yang bersifat strategis tentang **“Bagaimana Pandangan Tiongkok atas Keterlibatan Amerika Serikat dalam Proses Penyatuan Tiongkok dan Taiwan?”**.

KERANGKA ANALITIK

Neorealisme merupakan pendekatan yang muncul karena kritik terhadap teori realisme, realis hanya menganggap bahwa negara sebagai satu-satunya aktor dominan dalam hubungan internasional, hanya ada perang dalam hubungan antara negara serta tidak menggunakan pendekatan yang lain sebagai perbandingan. Serta tertuangnya ide dan asumsi dasar kaum realis adalah (1) pandangan pesimis atas sifat manusia; (2) keyakinan bahwa hubungan internasional pada dasarnya konfliktual dan bahwa konflik internasional pada akhirnya diselesaikan melalui perang; (3) menjunjung tinggi nilai-nilai keamanan nasional dan kelangsungan hidup; (4) skeptisisme dasar bahwa terdapat kemajuan dalam politik internasional seperti yang terjadi dalam kehidupan politik domestik. Pemikiran dan asumsi ini mengendalikan pemikiran dari sebagian besar teoritis hubungan internasional realis terkemuka, baik di masa silam maupun sekarang (Jackson & Sorensen, 2009).

Sebagaimana dengan pendahulunya pendekatan realis, pendekatan neo-realis pada dasarnya masih berkuat pada permasalahan yang berkaitan dengan power. Namun perubahannya adalah pada fokus power yang digunakan dan indikatornya. Pada pendekatan realis klasik, power lebih dikaitkan dengan kekuatan militer yang dimiliki oleh suatu negara. Meskipun tokoh realisme Hans Joachim Morgenthau menyebutkan dalam unsur kekuatan nasional power yang dimiliki oleh sebuah negara terbagi atas sembilan unsur, tetapi pada dasarnya kekuatan militer menjadi dasar utamanya. Atau dengan kata lain, unsur selain militer menjadi pendukung atas kekuatan militer sebuah negara.

Dimana hal ini sangatlah wajar, karena perkembangan pendekatan realis klasik pada

dasarnya berkembang pada saat dunia sedang dalam perdebatan besar menyangkut isu perang dan damai. Pendekatan realis ini sangat dominan dalam khasanah hubungan internasional terutama pada saat pasca Perang Dunia II dan masuk pada masa Perang Dingin, di mana unsur kekuatan militer menjadi sebuah keniscayaan dalam pembentukan negara. Namun pasca Perang Dingin, perkembangan dunia yang kemudian mengarah kepada pembangunan ekonomi, sehingga isu politik tidak banyak mendominasi. Pada saat inilah kemudian muncul pendekatan neo-realis yang sebenarnya menjadi pelengkap dari realis itu sendiri dalam menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Perkembangan pendekatan neo-realis membawa isu-isu baru dalam hubungan internasional yang berkaitan dengan isu politik di tengah pembangunan ekonomi dunia. Salah satu isu yang menarik dalam perkembangan ini adalah bergesernya permasalahan isu keamanan dari keamanan tradisional menjadi keamanan non-tradisional. Keamanan non-tradisional ini seperti misalnya pada masalah lingkungan hidup, kemanusiaan, perdagangan, bahkan selain itu juga demokrasi (Effendi, 2015).

Dalam hubungan internasional, salah satu teori yang terkemuka adalah teori neorealisme. Dalam neorealisme, ada enam kunci yang menjadi pembahasan utama yaitu anarki, struktur, kemampuan, distribusi kekuatan, polarity dan kepentingan nasional. Menurut Kenneth Waltz tokoh dari terbentuknya teori ini, dalam buku *Theory of International Politics* berupaya memberikan penjelasan ilmiah tentang sistem politik internasional. Dalam pandangan Waltz, teori Hubungan Internasional yang terbaik adalah teori sistem kaum neorealis yang intinya memfokuskan pada struktur sistem, pada unit-unitnya yang berinteraksi, dan pada kesinambungan dan perubahan sistem. Dalam realisme klasik, para pemimpin negara dan penilaian subjektifnya tentang hubungan internasional merupakan pusat perhatiannya. Dalam neorealisme, sebaliknya, struktur sistem, khususnya distribusi kekuatan relatif, merupakan fokus analitis utama. Aktor-aktor kurang begitu penting sebab struktur memaksa mereka beraksi dengan cara-cara tertentu. Struktur-struktur pada dasarnya menentukan tindakan-tindakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan utama memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai isu yang dikaji. Pemilihan metode ini didasarkan pada kemampuannya dalam menyajikan data secara deskriptif, sehingga memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara lebih rinci dan dalam konteks yang lebih luas. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah wawancara terfokus (*focused interview*), di mana peneliti berinteraksi secara langsung dan melakukan pertemuan tatap muka dengan informan untuk memperoleh data yang lebih kaya dan mendalam. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji Pandangan Tiongkok Atas Keterlibatan Amerika Serikat Dalam Proses Penyatuan Tiongkok Dan Taiwan.

PEMBAHASAN

A. Sejarah Hubungan China-Taiwan

Hubungan China-Taiwan bisa dibilang hubungan yang rumit dan mengalami pasang surut. Perebutan kekuasaan pemerintahan antara pihak nasionalis dan komunis di daratan pasca runtuhnya dinasti kerajaan China merupakan refleksi obsesi dan idealisme rakyat China terhadap wilayahnya. Meletusnya konflik diantara keduanya dan terjadinya perang saudara di karenakan banyaknya perbedaan ideologi.

Konflik China-Taiwan ini dimulai Pasca Perang Dingin, salah satu isu terpenting di kawasan ini adalah konflik Selat Taiwan. Konflik China-Taiwan ini merupakan warisan sejarah perang saudara antara Partai Nasionalis China (PNC) dan Partai Komunis China (PKC) tahun 1945-1949 di daratan China. Pada perang sipil tersebut, pasukan PNC di bawah komando Chiang Kaishek menderita kekalahan dan mundur ke pulau Formosa atau yang kita kenal sekarang dengan Taiwan (CNN Indonesia, 2015).

Pada tahun 1926 China Daratan di kuasai oleh Chiang Kai-Shek dibawah partai Kuomintang (partai nasionalis). Di era pemerintahan Chiang Kai-Shek pada saat itu mampu melawan dan mengakhiri penjajahan Jepang yang berlangsung selama 50 tahun. Kai-Shek membentuk status pulau tersebut menjadi provinsi China. Pada saat itu China memperoleh kemerdekaan dari Jepang. Namun dalam pemerintahan KaiShek banyak terjadi korupsi dan eksploitasi sumber daya alam China daratan setelah rekonstruksi pasca perang dengan Jepang. 30 Industri China daratan secara langsung mensuplai kebutuhan Beijing sehingga ekonomi di kepulauan China menjadi krisis. Pengangguran banyak terjadi yang mengakibatkan demonstrasi masif pada tahun 1947 dan berlanjut pada peristiwa Teror Putih yaitu pembunuhan sekitar 18.000 sampai 300.000 elit akademik dan elit politik penduduk asli di Taiwan oleh Chiang Kai-Shek untuk menunjukkan kontrolnya.

Kontrol ini justru menimbulkan gerakan komunis. Partai Komunis China (PKC) yang dipimpin oleh Mao Zedong mengadakan perang kebebasan yang berhasil menaklukkan Partai Kuomintang (PKMT) pada Oktober 1949. Kemudian Mao mengambil alih China daratan dengan diproklamirkannya Republik Rakyat China (RRC) dan PKC adalah partai tunggal sah di China. Chiang Kai-Shek akhirnya mengundurkan diri dan membawa pasukan beserta para pengungsi ke Pulau Formosa atau Taiwan dan cadangan emas RRC. Pada perkembangannya, Chiang menginginkan Taiwan sebagai negara baru yang berdaulat dan tidak berada di bawah pemerintahan RRC.

Pasca kemenangan Partai Komunis merebut daratan China (RRC), Chiang Kai-Shek beserta pasukan dan pengikutnya kabur mengasingkan diri mencari wilayah untuk ditempati dan akan membangun suatu negara yang sesuai dengan visi misi mereka tanpa pengaruh dari komunis. Akan tetapi usaha Chiang Kai-Shek dan pengikutnya kerap digagalkan oleh China (PKC). Berbagai rintangan dan pemberontakan dihadapi oleh Kai-Shek untuk dapat melepaskan diri dari RRC hingga terjadinya peristiwa Krisis Selat Taiwan yang menjadi klimaks konflik diantara keduanya yang melibatkan negara-negara yang memiliki kekuatan dan berpengaruh dalam tatanan dunia yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet mengintervensi konflik tersebut, yang pada saat itu AS dan US sedang dalam perang dingin. Dimana RRC bersekutu dengan Uni Soviet untuk menyerang dan memojokan Chiang Kai-Shek.

Chiang Kai-Shek dalam pelariannya untuk mendapatkan suatu wilayah dan cita-cita membangun negara sering mengalami tentangan hingga serangan militer dari RRC. Dilihat dari tragedi Krisis Selat Taiwan pertama 1954-1955, konflik bersenjata singkat yang terjadi antara RRC dengan Republik China (Chiang Kai-Shek dan pengikutnya). RRC menyerang Republik China yang pada saat itu berada di Kepulauan Yijiangshan, dan memaksa Republik China untuk meninggalkan Kepulauan Tachen, yang pada akhirnya RRC berhasil menguasai wilayah tersebut. Krisis ini terjadi tidak lama setelah Perang Korea yang diakhiri dengan gencatan senjata pada tahun 1953. Amerika Serikat, yang memang tak menyukai rezim komunis China bersekutu dengan Uni Soviet (Rusia) yang menjadi musuh AS saat perang dingin, melihat begitu besarnya pengaruh China akhirnya memutuskan untuk bersekutu dengan Republik China dan membantu mengevakuasi personel militer Republik China dari

Tachen ke Formosa (Taiwan). Meski akhirnya berakhir dengan gencatan senjata, krisis ini akhirnya berlanjut ke krisis selanjutnya di selat yang sama. Pasca terjadinya krisis ini AS membuat suatu perjanjian dengan pihak Chiang Kai-Shek (Taiwan) yaitu Mutual Defence Treaty (MDT), untuk membantu Taiwan dalam menanggulangi masalah ancaman dari China. Itu juga menjatuhkan larangan terhadap kebebasan sipil dan berpolitik, memenjarakan dan menghukum lawan-lawannya, dan mengawasi secara ketat dialek asli Taiwan (Global Security, 2018).

Krisis Selat Taiwan kedua 1958 merupakan serangan kedua RRC terhadap Republik China (Taiwan). Selang beberapa tahun, intimidasi di kepulauan kecil di tengah selat tersebut kembali berlanjut. Kala itu, Kai-Shek dan pengikutnya masih mendiami kepulauan Matsu dan Quemoy. China akhirnya menggempur kedua kepulauan tersebut dan memukul pasukan musuhnya ke Taiwan yang tadinya disebut Pulau Formosa dan menetap hingga sekarang di pulau tersebut. Dalam krisis selat Taiwan kedua ini AS pun ikut turun tangan lagi atas permintaan Taiwan, mengingat AS memiliki perjanjian atas menjaga keamanan Taiwan dari ancaman China sesuai dengan MDT yang diratifikasi kedua negara pada 1954. Menurut situs sejarah AS, presiden AS saat itu, Dwight D. Eisenhower, memerintahkan penurunan angkatan laut dan beberapa pasukan militer di kawasan itu, sekaligus untuk menjaga jalur pasokan ke Taiwan.

Setelah Krisis Selat Taiwan kedua berakhir, kontak senjata kemudian berhenti juga dan situasi di Selat Taiwan kondusif setidaknya untuk 30 tahun selanjutnya. Berkurangnya gesekan militer yang terjadi diantara keduanya membuat Chiang Kai Shek fokus terhadap national building negaranya (Taiwan) yang di cita-citakan dan memulai membangun kerjasama dengan negara-negara lain.

Berbanding terbalik dengan Taiwan, RRC melalui One China Policy menginginkan Taiwan kembali bersatu dengan RRC, menyusul masuknya Hongkong dan Makau untuk bergabung kembali. One China Policy berarti hanya ada satu China yaitu China daratan (RRC), Tibet, Hongkong, Makau, Xinjiang, maupun Taiwan adalah bagian dari China. Hal ini adalah alasan utama bahwa RRC dan Taiwan harus melakukan unifikasi. RRC selalu membujuk Taiwan atas sistem One Nation, Two States agar Taiwan dapat bergabung dengan RRC. Secara de jure maupun de facto Taiwan adalah bagian dari RRC dan RRC adalah pemerintahan yang sah. Namun masih banyak hambatan yang dihadapi oleh RRC dalam usaha reunifikasi dengan Taiwan.

Upaya mencegah Taiwan merdeka adalah masalah penting bagi RRC karena menyangkut kredibilitas di mata rakyatnya. Untuk tetap menjaga kredibilitas tersebut, Beijing bertekad menempuh segala cara, termasuk invasi ke Taiwan meskipun nantinya RRC akan berhadapan juga dengan AS. RRC mengklaim bahwa Pulau Formosa yang berganti nama menjadi Taiwan adalah bagian dari RRC berdasarkan sejarah yang tercatat tahun 304 M dengan nama Pulau Yizh Liuqiu. Di masa Dinasti Sui, penduduk China daratan mulai memasuki pulau ini. Berbagai dinasti China selanjutnya juga tercatat menguasai pulau ini hingga akhirnya terjajah oleh Jepang.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Chiang KaiShek adalah seorang diktator yang didukung oleh agen rahasia militer, Taiwan Garrison Command. Posisinya menghadapi dua tantangan. Di satu sisi, penduduk asli Taiwan yang ingin memerdekakan Taiwan, menolak aturan yang ditegakkan oleh RRC. Di sisi lain, munculnya ancaman invasi dari komunis RRC. Chiang Kai-Shek mengawali pemerintahan baru dengan menampung generasi muda dan penduduk asli Taiwan dengan fokus utama pada perubahan dari menaklukkan kembali RRC

menjadi pembangunan di Taiwan itu sendiri. Pada akhir 1960- an, Taiwan mengalami penurunan dukungan dari AS karena politik Perang Dingin.

Pada tahun 1971, Sidang Majelis Nasional PBB meluluskan Resolusi 2758 pada tahun 1971 yang memulihkan hak-hak RRC dan pemerintah nasionalis Taiwan dikeluarkan oleh PBB. Resolusi ini hanya membahas hak perwakilan RRC di lembaga internasional dan tidak menyatakan bahwa Taiwan adalah bagian dari RRC, tidak memberikan hal perwakilan Taiwan kepada RRC maupun kepada organisasi lainnya di bawah PBB. Sejak RRC berdiri pada tahun 1949, RRC tidak pernah memerintah di Taiwan. Dengan kata lain, Taiwan adalah negara merdeka, memiliki pemerintahan sendiri yang terpisah dari China daratan.

B. Dinamika Konflik China-Taiwan

Setelah pemerintahan Kuomintang berakhir digantikan oleh Lee Teng Hui yang berasal dari Democratic Progressif Party (DPP), di era pemerintahan Lee Teng Hui hubungan antara China-Taiwan mengalami naik turun, sempat membawa konflik China-Taiwan sedikit mereda dengan membuat beberapa perundingan dengan pihak China, akan tetapi konflik diantara keduanya memuncak lagi hingga ada pergesekan militer. Dan hubungan Taiwan dengan AS di era Lee Teng Hui sangat intens memiliki hubungan yang lebih dekat dibandingkan dengan pemerintahan Taiwan yang sebelumnya. Bahkan pemasokan senjata dan bantuan militer lainnya dari AS sangat intens di era Lee Teng Hui.

Setelah Pemerintahan Lee Teng-Hui berakhir dan digantikan oleh Chen Shui-Bian yang berasal dari partai yang sama (DPP), presiden Chen Shui Bian dianggap presiden yang sangat ambisius untuk memerdekakan Taiwan sehingga konflik antara China-Taiwan pun tidak mengalami penurunan bahkan di era Chen Shui-Bian China mengancam akan mengerahkan kekuatan militernya ke Taiwan jika masih bersih keras untuk memerdekakan diri, hubungan Taiwan – AS di era Chen meningkat, terutama dibidang ekonomi, akhir tahun 2000 Taiwan merupakan pasar penjualan terbesar ke lima untuk Amerika. Di era Chen hubungan Taiwan-AS tetap intens dan mengalami perkembangan pesat dibidang ekonomi. Setelah pemerintahan Chen Shui-Bian berakhir dan digantikan oleh Ma Ying Jeou, sosok Ma di era pemerintahannya memberi cahaya kedamaian terhadap konflik China-Taiwan, dimana konflik diantara kedua negara tersebut mengalami penurunan dan memulai membuka hubungan kerjasama bilateral, dan gesekan militer diantara kedua negara pun bisa dibilang sudah tidak pernah terjadi, masing-masing pemimpin negara lebih fokus terhadap perkembangan perekonomian yang mengalami kemajuan. Hubungan AS-Taiwan di era Ma Ying Jeou tetap berjalan seperti sedia kala, dimana AS tetap menjadi pemasokan senjata utama Taiwan, walaupun intensitas konflik antara China-Taiwan sudah meredah. Di tahun 2016 Ma Ying-Jeou digantikan oleh Presiden perempuan pertama di Taiwan, yaitu Tsai Ing-Wen, dimana hubungan antara China-Taiwan sudah semakin membaik, walaupun Ing-wen dimasa pemerintahannya tetap memiliki strategi sendiri untuk tetap menjaga keamanan negaranya dari mantan musuh yang sekarang sudah menjadi “Teman” dalam pembangunan perekonomian yang lebih maju. Hubungan Taiwan dengan AS di era Ing-wen pun tetap berjalan baik dan tidak ada tandatanda dalam pemutusan kerjasama militer diantara keduanya.

Begitupun juga dengan AS dengan meredahnya konflik China-Taiwan yang ditunjukkan dengan intensitas kerjasama-kerjasama bilateral antara dua negara, tidak menggoyahkan AS untuk berhenti bekerjasama militer dengan Taiwan. Dimana AS tetap menjadi pemasokan senjata utama Taiwan. Sejak rezim Jimmy Carter, George Walker Bush, Barack Obama hingga

memasuki rezim Donald Trump-pun Amerika Serikat masih terus konsisten menjadi provider persenjataan bagi Taiwan dan terus menunjukkan komitmennya untuk menjalin kerjasama dengan Taiwan. Hal ini terjadi bukan hanya karena AS memiliki komitmen untuk melakukan apa saja guna mengakomodir kepentingan negaranya, melainkan AS memiliki kepentingan-kepentingan lainnya yang bersifat pribadi dan ada sesuatu yang tersembunyi yang ingin dicapai AS dalam hubungan kerjama militer ini, serta menjaga kepentingan dan tujuan awal negaranya.

C. Intervensi Amerika Serikat Dalam Konflik China-Taiwan

Pada masa pemerintahan Presiden George W Bush Amerika Serikat telah melakukan penguatan aliansi di kawasan Asia Pasifik hal tersebut dikarenakan Amerika Serikat mulai Menyadari munculnya kekuatan baru di kawasan Asia Pasifik yaitu Tiongkok. Bush menganggap Tiongkok bukan sebagai strategic partner, namun lebih menampilkan kesan Tiongkok sebagai America's enemy. Bush meningkatkan penjualan senjata ke Taiwan, menegaskan komitmen untuk pertahanan Taiwan, serta mengubah arah strategi pertahanan Amerika Serikat dari Eropa menjadi fokus pada Asia Pasifik sebagai bentuk penghitung terhadap kekuatan militer Tiongkok (Defense, 2008).

Disisi lain Tiongkok terus meningkatkan pembelian persenjataan dari Rusia sehingga Amerika melihat hal ini sebagai ancaman, tidak hanya untuk Taiwan, tetapi juga ancaman bagi stabilitas keamanan di wilayah Asia Pasifik (Defense, 2008). Melihat hal tersebut Amerika menyatakan keberatan terhadap keputusan Uni Eropa untuk mencabut embargo penjualan senjata pada Tiongkok, kerena Amerika khawatir apabila hal tersebut terjadi maka akan memperkuat persenjataan Tiongkok, jika Tiongkok memiliki persenjataan yang kuat di takutkan Tiongkok akan menyerang Taiwan sehingga Amerika melakukan deterrence terhadap Tiongkok sehingga Tiongkok tidak menyerang Taiwan secara langsung (Wabiser, 2015, p. 10).

C.1 Taiwan Relations Act

Konflik antara Tiongkok dan Taiwan terjadi di akibatkan oleh perbedaan kepentingan dan keinginan dari kedua belah pihak dimana Tiongkok menginginkan terwujudnya kebijakan satu China sedangkan Taiwan menginginkan kemerdekaannya, Hal ini dapat didasari dari segi kepentingan nasional dimana suatu Negara ingin merdeka karena ingin mengatur dan menjalani roda pemerintahan sendiri agar tercipta kesejahteraan untuk rakyatnya (Utha, Kompasiana, 2015).

Namun dalam konflik yang terjadi di antara kedua belah pihak terdapat campur tangan dari negara besar seperti Amerika Serikat bermain di belakang Taiwan. Intervensi yang di lakukan oleh Amerika Serikat sendiri bermula pada tahun 1950-an dimana tujuan awalnya yaitu Amerika Serikat berupaya mencegah serangan komunis RRT terhadap Taiwan dengan cara menempatkan Pasukan Laut Ketujuh (The Seventh Fleet) di Taiwan, namun seiring berjalannya waktu kepentingan Amerika di kawasan Asia Pasifik semakin bertambah dan Tiongkok sebagai negara pesaing terkuat AS di kawasan Asia Pasifik di anggap sebagai penghalang (Utha, Kompasian, 2015).

Perjanjian Taiwan Relations Act (TRA) dimulai pada tanggal 10 April 1979, perjanjian tersebut menandakan bahwa hubungan selain diplomatik di antara Amerika Serikat dan Taiwan tidak berakhir, dengan diakuinya hanya ada satu China melalui Shanghai Communiqué pada

tanggal 28 Pebruari 1972. Melalui TRA, Amerika Serikat tetap menjalin hubungan perdagangan, kebudayaan dan berbagai hubungan yang tidak resmi lainnya. Di bawah TRA Amerika Serikat menjalankan kebijakan sebagai berikut:

- a) Memelihara dan mengembangkan hubungan kultural, perdagangan dan lainnya secara ekstensif dan bersahabat di antara Amerika Serikat dan rakyat Taiwan.
- b) Mendeklarasikan perdamaian dan stabilitas di area kepentingan politik, keamanan dan ekonomi Amerika Serikat dan di area yang menjadi perhatian internasional.
- c) Memperjelas masa depan Taiwan akan ditentukan oleh cara-cara damai, menganggap bahwa usaha-usaha yang menentukan masa depan Taiwan, selain cara-cara damai termasuk boikot atau embargo, merupakan ancaman keamanan dan perdamaian bagi negara-negara Pasifik Barat dan menjadi perhatian penting bagi Amerika Serikat.
- d) Menyediakan persenjataan defensive untuk Taiwan.
- e) Meyakinkan hak untuk melawan segala macam bentuk serangan atau koersi yang akan mengancam keamanan atau sistem ekonomi dan sosial rakyat Taiwan (Chang J. C., 2001).

D. Respons Tiongkok Terhadap Intervensi AS Dalam Konflik Taiwan-Tiongkok

Dalam bidang politiknya, China dikuasai oleh satu partai saja, yaitu Partai Komunis China (PKC). Awal mula dari adanya One China Policy adalah akibat terjadinya perselisihan antara dua partai dengan dua ideologi yang berbeda. Partai Komunis China (PKC) sesuai namanya menganut ideologi komunis dan digunakan sebagai ideologi China sampai saat ini. Sedangkan partai lain yang menjadi lawan Partai Komunis China (PKC) menganut ideologi nasionalis dan dikenal dengan nama partai Kuomintang Tiongkok. Nama partai ini didapat dari terjemahan Kuomintang sendiri yang artinya adalah partai nasionalis.

One China Policy merupakan sebuah pengakuan diplomatik dari China yang menyatakan bahwa hanya ada satu pemerintah China yang resmi yang mencakup China daratan, Hong Kong, Macau, dan Taiwan. Dengan kata lain, China membuat kebijakan ini untuk menyatakan bahwa Taiwan merupakan wilayah yang masih berada di teritori China. Jika negara-negara lain ingin tetap bekerjasama dengan China, maka negara tersebut harus menghormati serta mengakui posisi China yang resmi hanya memiliki satu pemerintahan (UMYRepository).

Meskipun terjadi perseteruan dengan dikeluarkannya One China Policy, Taiwan dan China daratan masih tetap menjalin hubungan yang baik. Alasannya adalah jika melakukan klaim negara masing-masing akan sangat melelahkan serta perang akan memerlukan banyak biaya dan akan memakan banyak korban jiwa. Selain itu, Taiwan pun tidak mungkin bergabung bersama China karena memiliki standar dalam kehidupannya yang lumayan tinggi dan juga menjunjung tinggi kebebasan dalam berpolitik. Hal tersebut karena Taiwan merupakan negara demokratis yang memiliki sifat terbuka dalam pemilihan umum serta dapat menentang pengekangan yang terjadi. Masyarakat Taiwan sempat melakukan demonstrasi untuk memprotes perjanjian dagang yang telah dibuat dengan China. Dengan begini, masyarakat Taiwan harus menyadari bahwa China merupakan partner dagang terbesar bagi Taiwan.

Republik Rakyat China (RRC) merupakan negara yang dikenal sebagai negara dengan

jumlah penduduk terbanyak di dunia serta negara dengan wilayah yang luas ke-4 di dunia. Taiwan yang berdiri dan menganggap dirinya adalah sebuah negara tidak ingin kembali atau bergabung kembali dengan China. Namun, pemerintahan China menganggap bahwa wilayah yang ditempati Taiwan adalah bagian dari China daratan dan pemerintahan China mengatakan bahwa mereka akan membuat Taiwan kembali lagi sebagai bagian dari China bagaimana pun caranya, meskipun hal itu harus menggunakan kekerasan Setelah Perang Dunia II selesai, Taiwan kembali kepada China yang mana sebelumnya berpisah karena adanya Perang Saudara China dari tahun 1940-an secara de jure dan de facto. Tak lama setelahnya, banyak campur tangan berupa bantuan diplomatik dan kekuatan dari pihakpihak luar yang memunculkan masalah baru yang berkaitan dengan perang saudara (Kuomintang Tiongkok).

Pemerintahan China mendeklarasikan One China Policy ini dalam forum internasional dan menyatakan bahwa Taiwan memang sudah seharusnya tunduk dan mematuhi One China Policy karena Taiwan telah menyepakati konsensus bersama dengan China pada tahun 1992 di Hongkong. Dengan demikian, China menganggap bahwa kebijakan One China Policy ini merupakan sebuah kebijakan yang tidak dapat diganggu gugat kembali oleh siapa pun termasuk Taiwan. Namun, Chen Shui-bian, selaku mantan presiden Taiwan menolak untuk mengakui One China Policy dan ia juga mengatakan bahwa sejak 1949, China dan Taiwan tidak lagi dapat mewujudkan sebuah sinergi, sehingga Taiwan harus terus mengupayakan sebuah negosiasi sebagai upaya tercapainya kedaulatan yang penuh sebagai sebuah negara yang tidak identik dengan China.

Melalui One China Policy, Taiwan harus mengikuti dan mematuhi kebijakan tersebut. Namun, kebijakan ini tidak membuat Taiwan ingin bergabung dengan China. Taiwan sebagai sebuah wilayah menganggap dirinya merupakan sebuah negara yang berdaulat karena secara de facto, Taiwan dapat dikatakan sebagai sebuah negara. Ketidakinginan Taiwan untuk bergabung dengan China ini tidak membuat One China Policy ini dicabut atau dibatalkan. China justru membuat kebijakan ini menjadi semakin ketat dengan mengatakan bahwa setiap negara yang ingin menjalin hubungan kerjasama dan diplomatik dengan China harus mengikuti dan mematuhi One China Policy.

Prinsip One China Policy ini dikatakan sebagai sebuah perjalanan bagi rakyat China sebagai upaya untuk melindungi pemerintahan dan kedaulatan China serta integritas wilayahwilayahnya. Taiwan merupakan bagian dari China yang dikatakan tak terpisahkan karena semua fakta dan hukum mengenai Taiwan dapat menjadi bukti bahwa Taiwan adalah bagian dari wilayah China yang tak terpisahkan. Pada hari ditetapkannya One China Policy, China mengatakan kepada seluruh pemerintahan negara di dunia bahwa pemerintahan China merupakan pemerintahan satu-satunya yang sah yang menjadi perwakilan dari seluruh rakyat China.

KESIMPULAN

Adanya proses reunifikasi Taiwan-Tiongkok yang saat ini sedang gencar dilaksanakan oleh pemerintahan Xi Jinping dan telah berlangsung sejak dahulu membuat berbagai isu ini memanas. Hal ini dikarenakan pada prosesnya, Taiwan menolak untuk bergabung dengan Tiongkok karena ingin memiliki pemerintahannya sendiri. Selain itu, terdapat intervensi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan mendukung Taiwan agar menolak reunifikasi Taiwan-Tiongkok melalui berbagai kebijakan seperti Taiwan Relations Act (TRA).

Hal ini membuat Tiongkok geram karena pasalnya Tiongkok telah mengeluarkan kebijakan One China Policy (ONP) yang menyatakan hanya ada satu China di dunia yaitu Republik Rakyat Tiongkok (RRT). AS bersikeras mendukung Taiwan agar tidak jatuh ke tangan Tiongkok karena akan menjadi kekalahan besar bagi AS di Asia Timur jika Taiwan jatuh ke tangan Tiongkok. Merespons hal ini, China melakukan peningkatan anggaran militer secara besar-besaran serta modernisasi alutsista karena ingin meningkatkan efek deterren serta khawatir jika terjadi eskalasi konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, J. (2020). THE THEORETICAL SIGNIFICANCE OF FOREIGN POLICY IN INTERNATIONAL RELATIONS - AN ANALYSES. *Journal of Critical Reviews*, Vol 7, Issue 2, 787- 792.
- Albert, E. (2016). *China-Taiwan Relations*. Council on Foreign Relations, 7.
- Albert, E. (2018, Februari 9). China's Big Bet on Soft Power. Retrieved Januari 25, 2022, from CFR: <https://www.cfr.org/background-er/chinas-big-bet-soft-power>
- Aukus: China denounces US-UK Australia pact as irresponsible. Retrieved Februari 10, 2022, from [bbc.com: https://www.bbc.com/news/world-58582573](https://www.bbc.com/news/world-58582573)
- Ayurezeki, A. (2008). "Permasalahan Hukum Keanggotaan Taiwan Dalam World Trade Organization". Skripsi. Program Kekhususan Hukum Tentang Hubungan Transnasional, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
- Basorwi dan Surwati, *Memahami Penelitian Kualitatif* ', (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008)37.
- BBC News. Taiwan's Tsai Ing wen: The strangest of wees for a new leader. <https://www.bbc.com/news/world-asia-35370367>
- BBC. (2013, Agustus 30). Syria crisis: Cameron loses Commons vote on Syria action. Retrieved from [www.bbc.com: https://www.bbc.com/news/ukpolitics-23892783](https://www.bbc.com/news/ukpolitics-23892783)
- BBC. (2021, Mei 26). What's behind the China-Taiwan divide? Retrieved from BBC News: <https://www.bbc.com/news/world-asia-34729538> [bbc.com. \(2021, September 17\).](https://www.bbc.com/news/world-asia-34729538)
- Bennhold, K., & Ewing, J. (2020, Januari 16). In Huawei Battle, China Threatens Germany 'Where It Hurts': Automakers. Retrieved Januari 25, 2022, from The New York Times: <https://www.nytimes.com/2020/01/16/world/europe/huaweigermany-china-5gautomakers.html>
- Bolton, J., & Zitelman, D. R. (2021, Agustus 23). Why Taiwan Matters to the United States. (DIPLOMAT MEDIA INC), from The Diplomat: <https://thediplomat.com/2021/08/why-taiwan-matters-to-theunited-states/>
- Bradsher, K. (2020, Agustus 31). China's Exports Are Surging Despite Tariffs and Coronavirus. Retrieved from The New York Times: <https://www.nytimes.com/2020/08/31/business/trumps-tariffscoronavirus-china-exports.html>
- Bugajski, J. (2019, April 30). China's Eurasian Ambitions. Retrieved Januari 25, 2022, from Center for European Policy Analysis: <https://cepa.org/chinas-eurasianambitions/>
- Bureau of East Asian and Pacific Affairs. (2018, Agustus 31). U.S. Relations With Taiwan. Retrieved from U.S. DEPARTMENT of STATE: <https://www.state.gov/u-srelations-with-taiwan/>
- China.org.cn. (2022, Januari 18). The One-China Principle and the Taiwan Issue. Retrieved from China.org.cn: <http://www.china.org.cn/english/taiwan/7956.htm>
- Bush, R. (2016). *The United States Security Partnership with Taiwan*. Brookings.
- Buzan, Barry and Hansein. 2009. *The Evolution of International Security Studies*. New York:

- Cambrigne University Press Calder,
Cahya, M. L. J. F. (2018). "Kebijakan One China Policy Versi Taiwan Sebagai Respon Reunifikasi Tiongkok Pada Masa Pemerintahan Lee Teng Hui". Skripsi. Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah, Malang.
- Clausewitz, G. C. (1873). *On War* tr. J.J. Graham. London: N. Trübner
- CNN Indonesia.2015. Menengok hubungan Taiwan-China : Musuh Tapi Mesarah. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20151105135044-113-89679/menengok-hubungan-taiwan-china-musuh-tapi-mesrah>.
- Connolly, G. E. (2020). *The Rise of China: Implications for Global and Euro-Atlantic Security*. NATO Parliamentary Assembly, Political Committee. NATO Parliamentary Assembly.
- Deng, Y. (2008). *China's Struggle for Status*. New York: Cambridge University Press.
- Dewi, I. F. dan Dewi, K. U. (2019). Strategi Pemerintahan Xi Jin Ping Terhadap Taiwan Dalam Mengamankan Kedaulatan Tiongkok. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(2), 161-168
- Dewi, I. F. (2018). Strategi Keamanan Tiongkok Terhadap Taiwan Di Masa Pemerintahan Xi Jinping.
- Dewi, I. F., & Dewi, K. U. (2019). Strategi Pemerintahan Xi Jinping terhadap Taiwan dalam Mengamankan Kedaulatan Tiongkok. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(2), 161-168.
- Dwi. 2015. Analisis Kebudayaan Defensif Militer Cina dan Benturan Strategisnya dengan Amerika Serikat
- Global Security.2018. First Taiwan Strait Crisis Quemoy and Matsu Islands
- Hajiansyah, P. P., & Maulana, I. (2022). Intervensi Amerika Serikat Apabila Republik Rakyat Tiongkok Menginvasi Taiwan (United States Intervention if the People's Republic of China Invades Taiwan). Available at SSRN 4128011.
- Harini, S. (2015). "Analisa Kebijakan Luar Negeri Melalui Perspektif Konstruktivisme Aspirasional".
- Haryanto, A., & Darmawan, A. B. (2015). Sengketa Laut Tiongkok Selatan: Ancaman Bagi Komunitas Keamanan ASEAN?. *Global Strategis*, 9(2), 277-296.
- Heath, T. R. (2016). China's evolving approach to economic diplomacy. *Asia Policy*, (22), 157-192.
- Huala Adolf, *Aspek-Aspek negara dalam hukum internasional*, cet ketiga, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002
- J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 1988
- Kaska, K., Minarik, T., & Beckvard, H. (2019, Maret). Huawei, 5G, and China as a Security Threat.
- Kent E. 1996. *Asia's Deadly Triangel: How Arms, Energy, and Growth Threaten to Destabilize Asia Pasific*. Jakarta: PT. Prenhallindo
- Kuntić, D. (2015). The Ominous Triangle: China-Taiwan-the United States relationship. *Croatian International Relations Review*, 21(72), 239-280.
- Mas'oed, Mochtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*. Yokyakarta: LP3ES